



Percepatan Digitalisasi Daerah, Target Jadi Percontohan

YOGYAKARTA, Joglo Jogja - Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mendesak jajarannya bisa mempercepat digitalisasi daerah. Dia menargetkan digitalisasi daerah bisa menjadi percontohan.

"Digitalisasi parkir juga akan meningkatkan pendapatan dan akan meningkatkan

akuntabilitas, sehingga dampaknya 'nuthuk' parkir enggak ada, menarik parkir dua kali, enggak ada. Saya berharap implementasi digitalisasi ini berdampak betul dan bisa kita rasakan menurunkan permasalahan di lapangan," kata Hasto saat High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan

Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Kamis (12/3/2026).

Hasto mengatakan, TP2DD yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik. Pengelolaan pemerintah yang modern, transparan, dan akuntabel menjadi suatu keniscayaan.

■ Baca **PERCEPATAN...** Hal II



LEBIH MUDAH: Launching Pesan Online Tiket Taman Pintar, Kamis (12/3/2026).

Percepatan Digitalisasi Daerah, Target Jadi Percontohan

sambungan dari hal Joglo Jogja

Percepatan digitalisasi pemerintah, harapannya lebih efisien dalam mengelola keuangan dan memperkuat akuntabilitas dalam manajemen keuangan.

Hasto menyebut, skor implementasi ETPD Kota Yogyakarta tahun 2025 mencapai 83,68 dan sudah masuk kategori digital optimal. Tapi, skor tersebut harus ditingkatkan dan ditargetkan digitalisasi daerah Kota Yogyakarta bisa menjadi percontohan.

"Indeks digitalisasi (daerah) ini penting sekali untuk menjadi satu percontohan di wilayah kita. Karena Kota Yogyakarta adalah kota yang sangat memungkinkan dari sisi geografis dan SDM untuk menjadi contoh pilot project yang baik untuk digitalisasi," tambahnya.

Target-target yang harus dilakukan, kata dia, adalah target-target yang realistis dan kontekstual. Termasuk organisasi perangkat daerah

(OPD) agar masing-masing membuat *roadmap* digitalisasi. Pada 2026 seluruh OPD Pemkot Yogyakarta menerapkan digitalisasi belanja pemerintah melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sehingga diharapkan bisa meningkat.

"High level meeting ini untuk mengajak seluruh pihak agar terus memperkuat komitmen, menyelaraskan langkah, dan memastikan bahwa setiap program yang telah kita rencanakan dapat diimplementasikan secara nyata," tegas Hasto.

Hasto juga mengapresiasi inovasi-inovasi P2DD yang dilakukan OPD Pemkot Yogyakarta bersama Bank BPD DIY dan Bank Indonesia. Salah satunya yang terbaru adalah layanan pembelian tiket Taman Pintar secara *online* dengan QRIS Tap dan nantinya diterapkan di TKP Giwangan.

Tapi, digitalisasi, kata dia,

dalam transaksi yang menasar para pedagang di pasar juga harus ditingkatkan karena potensinya besar meningkatkan digitalisasi daerah Kota Yogyakarta.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Raden Roro Andarini menambahkan, *roadmap* atau peta jalan ETPD Kota Yogyakarta 2026-2027 ada 4 kluster program yaitu kolaborasi sinergi mendorong kemandirian, kolaborasi dan sinergi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Sri Darmadi Sudibyo mengingatkan, ada perbedaan variabel penilaian ETPD dari 2025 dan di 2026, sehingga perlu dicermati. Aspek yang perlu terus ditingkatkan, yaitu koordinasi pusat dan daerah serta terkait dengan dokumen perencanaan untuk betul-betul dimasukkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Selain itu, masih perlu peningkatan persentase

Pendapatan Asli Daerah dan utilisasi penggunaan kartu kredit untuk belanja daerah.

"Digitalisasi ini dalam rangka mendukung transparansi, akuntabilitas, dan good governance agar tanggung jawab di dalam mengelola uang publik ini betul-betul bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya," papar Sudibyo.

Direktur Utama Bank BPD DIY Santoso Rohmad menyampaikan Bank BPD DIY sebagai pemegang kas daerah akan berkomitmen untuk turut serta mendampingi secara total program unggulan dan terobosan

"Kartu Kredit Indonesia Pemkot Yogyakarta tahun 2025 10 OPD dengan 91 persen transaksi sudah dilaksanakan. Pada tahun ini, semua OPD sudah menerapkan program kartu kredit itu. Kegiatan itu memperkuat peta jalan P2DD di Kota Yogyakarta dan digitalisasi belanja daerah," jelasnya. (eri/ amd/wa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

